

Mantan Kabais TNI Tegaskan Intelijen Tak Kebobolan soal Teror di Mabes Polri

JAKARTA (IM) - Eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksda TNI Soleman Ponto menegaskan, aksi teror ke Mabes Polri merupakan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pasalnya, badan tersebut dibentuk untuk menangani masalah terorisme di Indonesia.

Dia juga membantah bahwasanya penyerangan itu akibat dari bobolnya informasi pihak intelijen. Baginya, hal itu bukan menjadi bagian daripada tugas intelijen.

"Ya tidaklah (kebobolan intelijen) kalau kita berbicara teroris, pemberantasan teroris, penanggulangan teroris, satu satunya badan yang paling bertanggungjawab di Indonesia ini BNPT. Namanya aja Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan badan ini memang dibentuk untuk penanggulangan teroris," katanya dalam diskusi virtual bertajuk Awes Sesat

Milenial Radikal di Jagat Virtual, dikutip Senin (5/4).

Dia memaparkan, lain halnya jika tidak ada BNPT, maka kebobolan tersebut dapat menjadi tanggung jawab dari pihak Intelijen. Kendati demikian, Soleman menuturkan bahwa informasi-informasi yang dimiliki Intelijen bukan tidak mungkin telah diberikan kepada BNPT.

Menurut dia, tinggal bagaimana BNPT mau menggunakan informasi tersebut atau tidak.

"Lain masalahnya kalau tidak ada BNPT, baru bisa cari intelijen yang paling bertanggung jawab. Ini bukan masalah intelijen, ini masalah BNPT," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, seorang perempun berinisial ZA menerobos masuk Mabes Polri, Rabu 31 Maret 2021. Dia nampak membawa senjata api dan sempat menembak sebanjak enam kali secara sporadis. Namun, ZA akhirnya berhasil dihadiahi timah panas petugas dan tewas di lokasi. ● han

DPR Usul Bencana NTT Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena meminta pemerintah pusat menetapkan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.

"Melihat skala kerusakan dan bisa dipastikan seluruh daerah se-NTT kabupaten/kota semua terdampak, kemudian juga dengan korban jiwa dan kerusakan yang sedemikian hebat, kami meminta agar bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional," kata Melki, Senin (5/4).

Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan NTT II, berdasarkan informasi yang ia peroleh, kerusakan akibat bencana terjadi di hampir semua kabupaten/kota se-NTT.

Banyak rumah warga yang rubuh, jalan dan jembatan terputus, tiang listrik tumbang, hingga jaringan komunikasi yang sulit diakses.

"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa yang meninggal maupun

yang terdampak," katanya. Bila bencana alam di NTT ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial.

Selain itu, pemerintah pusat juga diharapkan membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana.

Ia meyakini, dengan adanya status bencana nasional, kerja sama dari pemerintah pusat hingga tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan bencana ini dapat dilakukan lebih cepat.

Seperti diketahui, banjir bandang telah menerjang dua desa di Flores Timur pada Minggu (4/4/2021) pukul 01.00 WITA.

Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang ini dipicu intensitas hujan tinggi. Banjir telah menerjang beberapa desa antara lain Desa Nелеlamadike di Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiwurak di Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumado serta Desa Waiwan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



MENKOMINFO KUNJUNGI SENTRA VAKSINASI INDONESIA BANGKIT

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kedua kanan) didampingi Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini (kiri), Direktur Utama Rumah Sakit UIAstuti Giantini (kedua kiri) dan Sekretaris Utama UI Agustin Kumorayati berfoto bersama saat meninjau vaksinasi untuk warga lanjut usia (lansia) di Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit secara drive thru di Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (5/4). Dua pekan sejak dibuka Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit telah melakukan suntik vaksin COVID-19 kepada sekitar 5.700 warga, selain itu sebanyak total 500 relawan gabungan dari anggota Ikatan Alumni UI, karyawan XL Axiata dan tenaga medis RSUI juga mendapatkan suntikan vaksin di tempat ini.

Hadiri Pernikahan Atta - Aurel Presiden Jokowi Menuai Kritikan

Kehadiran Presiden Jokowi di acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menandakan bahwa kegiatan seperti pernikahan dapat terselenggara kembali di masa pandemi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

JAKARTA (IM) - Kehadiran Presiden di pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang diunggah di laman sewrta akun Twitter resmi Kementerian Sekretariat Negara menuai kritikan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, tindakan Presiden Jokowi itu bukanlah contoh yang baik.

"Buat saya itu bukan contoh yang baik. Publik ingin melihat pemimpin yang sama sikap dengan perkataan," kata Mardani, Senin (5/4).

Mardani menilai pihak Kementerian Sekretariat Negara perlu ditegur. Ia pun akan mendalami hal ini dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama kementerian terkait.

"Ini perlu ditegur. Tugas Setpres mestinya terkait dengan

urusan pemerintahan dan kenegaraan. Urusan undangan pernikahan dan acara privat lainnya mestinya ditangani oleh tim khusus," ujarnya.

Menurut Mardani, wajar apabila sebagian masyarakat memberikan respon negatif atas kehadiran Jokowi di pernikahan tersebut. Pasalnya, menurut Mardani, seorang pemimpin seharusnya memberikan prioritas waktu untuk hal yang lebih besar.

"Sebagian menilai terlalu berlebihan jika dua tokoh menisihkan waktu untuk sebuah acara privat. Kalau saya berpendapat, ya memang itulah kualitas kepemimpinan kita saat ini. Waktu yang kita alokasikan menunjukkan prioritas kita. Jika kita ambil perkara kecil artinya kita membuang peluang melakukan perkara

besar," ucapnya.

Sebelumnya, YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah melakukan akad pernikahan pada Sabtu (3/4) di Hotel Raffles, Jakarta Selatan.

Hal yang menarik dalam akad pernikahan Atta dan Aurel, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi saksi. Acara akad pernikahan itu disiarkan langsung oleh stasiun televisi RCTI.

Jokowi diketahui menjadi saksi dari pihak Atta, sedangkan Prabowo menjadi saksi dari pihak Aurel. Publik yang mengetahui hal tersebut pun lantas ramai berkomentar di media sosial Twitter. Publik mengomentari akun Twitter @KemenseknegRI yang mengunggah momen Jokowi menjadi saksi pernikahan tersebut. Publik meminta agar akun tersebut digunakan untuk mengunggah postingan acara kenegaraan yang penting saja.

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza yang menganggap kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai saksi pernikahan youtuber

Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah tak perlu dipermasalahkan.

Sebab kehadiran Presiden Jokowi dalam pernikahan tersebut menandakan bahwa kegiatan seperti pernikahan dapat terselenggara kembali di masa pandemi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Tidak apa-apa. Malah itu pesan bahwa kegiatan masyarakat sudah harus berjalan seperti biasa. Tidak perlu khawatir lagi, asal protokol kesehatan tetap dijalankan sesuai aturan," kata Faisol, Senin (5/4).

Hal tersebut ia utarakan untuk menanggapi banyaknya kritikan publik terkait kehadiran Presiden Jokowi dalam pernikahan Atta-Aurel. Publik bahkan mengkritik akun Twitter milik Kementerian Sekretariat Negara @KemenseknegRI yang mengunggah momen di mana Presiden Jokowi

menjadi saksi di pernikahan tersebut.

Publik menilai, seharusnya konten semacam itu tidak diunggah lantaran tidak ada urgensi atau keterkaitan dengan urusan negara.

Menurut Faisol, hal tersebut seharusnya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Sebaliknya, Ketua Komisi VI DPR itu meminta masyarakat untuk lebih menanggapi persoalan yang penting salah satunya terkait vaksinasi Covid-19.

"Tidak menjadi masalah. Sebaiknya kita atau masyarakat menanggapi hal-hal yang lebih produktif saja misalkan apakah vaksinasi sudah sesuai dengan rencana yang disusun, dan lainnya," katanya.

Lebih lanjut, Faisol berpendapat, melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi juga merupakan pesan pemerintah. ● han

KPK Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Pengaturan Cukai di BP Bintan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi terkait kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Kelima orang saksi antara lain, Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMP/TPS Kabupaten Bintan, Alfeni Harmi, Anggota Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan, Yuriokandrar.

Lalu, Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan/ajudan Bupati Bintan periode 2016-2021, Rizki Bintani; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Bintan Kepala BP Bintan 2011-2016, Mardiah; dan pensiunan PNS, Restauli.

"Hari ini pemeriksaan saksi di Polres Tanjung Pinang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/4).

KPK telah melakukan pengeledahan 4 lokasi berbeda antara lain, Kompleks perumahan Rafflesia Batam, Kompleks Perumahan bukit raya indah sukajadi Batam, Kantor PT GBB (Golden Bamboo Bintan), di kawasan lytech industri Batam dan Kompleks Perumahan Sawang Permai, Batam. "Dari pengeledahan ini, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang yang berhubungan dengan perkara," kata Ali.

Dalam kasus ini, diduga KPK telah menetapkan tersangka. Sayangnya, hal tersebut belum dipublikasikan lantaran kebijakan baru pimpinan KPK.

"Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," sambung Ali.

Namun, lanjut Ali, pada

KPK Setor Rp5 Miliar dan USD35.000 ke Kas Negara sebagai Asset Recovery

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeter Rp 5.021.409.752 dan 35.000 dolar AS sebagai aset recovery atau pemulihan aset dari penangan perkara tindak pidana korupsi ke kas negara.

"Total uang yang disetorkan oleh KPK ke kas negara sebagai aset recovery dari penanganan perkara tipikor dimaksud sejumlah Rp 5.021.409.752 dan 35.000 dolar AS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (5/4).

Ali mengatakan, jaksas eksekusi KPK Andy Prihandono telah menyeter ke kas negara uang denda sejumlah Rp 200.000.000 dari terpidana mantan Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III I Kadek Kertha Laksana, pada Selasa (30/3) lalu.

Penyetoran itu, kata Ali, berdasarkan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta

Pusat Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Not Pst tanggal 1 Maret 2021. Ia juga menyebut, jaksas eksekusi KPK Suryo Sularto juga telah menyeter ke kas negara uang sejumlah Rp 4.821.409.752 dan 35.000 dolar AS sebagai uang rampasan dari terpidana mantan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Ahmad Yani pada Jumat (26/3) lalu.

Penyetoran itu juga, menurut Ali, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 245 K/PidSus/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap I Kadek Kertha selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 subsidier 2 bulan kurungan. I Kadek Kertha terbukti menjadi perantara suap sebesar 345.000 dollar Singapura (sekitar Rp 3,55 miliar) untuk mantan Dirut PTPN III Dolly Parlugutan Pulungan terkait distribusi gula.

Sementara itu, Ahmad Yani merupakan terpidana perkara suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis terhadap Ahmad Yani dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 subsidier 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar.

Majelis Hakim Kasasi MA kemudian memperberat hukuman Ahmad Yani menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200.000 subsidier 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar.

Ahmad Yani melalui perantara mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar mengatur pembagian uang "fee" proyek di Kabupaten Muara Enim. ● mei

IDN/ANTARA



RDP PERTAMINA DENGAN KOMISI VII DPR Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4). Rapat dengar pendapat (RDP) itu membahas kebakaran tangki minyak milik Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

Menag Yaqut Minta Acara Kemenag Diisi dengan Doa dari Semua Agama

JAKARTA (IM) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta setiap acara yang berlangsung di Kementerian Agama diisi oleh doa dari semua agama yang ada di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Yaqut saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama secara daring dan luring yang berlangsung mulai Senin (5/4) hingga Rabu (7/4).

"Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Quran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah kalau doanya diberikan kesempatan semua agama untuk memberikan doa," kata Yaqut, Senin (5/4).

Ia ingin agar Kemenag menjadi rumah bagi semua agama yang ada di Indonesia sehingga dapat melayani dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua penganut agama. Ia mengatakan, pembacaan doa

untuk agama tertentu saja di Kemenag akan memperlihatkan seolah-olah acara di Kemenag tak ubahnya seperti acara organisasi kemasyarakatan.

"Jadi jangan ini kesannya kita ini sedang rapat ormas kegiatan agama, ormas Islam Kementerian Agama. Kita sedang melakukan Rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja," katanya.

Yaqut menuturkan bahwa Kemenag harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi moderasi beragama. Ia tidak ingin Kemenag yang menggambar-gambarkan moderasi beragama, tetapi pada praktiknya berseberangan. "Jadi, kan lebih enak dilihat jika semua agama yang menjadi urusan sama-sama menyampaikan doanya. Ini otokratis, jangan sampai muncul paradoks. Jadi kita ingin kementerian ini melayani semua agama, tetapi dalam perilaku kita tidak mencerminkan itu," kata politisi PKB itu. ● han

IDN/ANTARA



RDP ADPMET DENGAN KOMISI VII DPR

Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4). Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari perspektif kepala daerah.